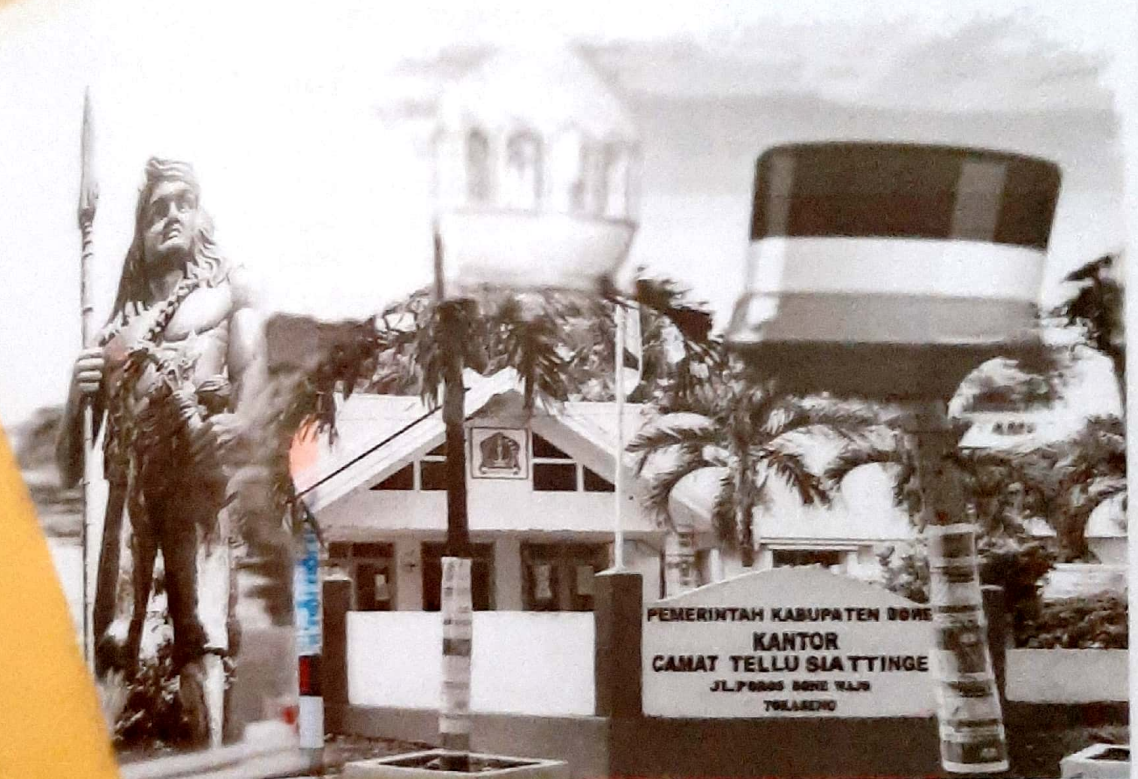




RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN TELLUSIATTINGE



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE
KECAMATAN TELLUSIATTINGE
TAHUN 2021**



**BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 28 TAHUN 2020**

TENTANG

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BONE TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 yang terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan serta memberi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021, maka diperlukan Dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Bone Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone tahun 2019 Nomor 55);
18. Peraturan Bupati Bone Nomor 28 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2021.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan,

pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

6. Perencanaan pembangunan adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilhan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk priode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk priode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan selama 1 (satu) tahun, dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, dan Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 disusun dengan maksud:

- a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2021;
- b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021; dan
- c. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021.

BAB III SISTEMATIKA PENULISAN

Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan;
Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
Bab V : Penutup.

- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:

Lampiran I	: Dinas Pendidikan
Lampiran II	: Dinas Kesehatan
Lampiran III	: BLUD Rumah Sakit Umum Daerah
Lampiran IV	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Lampiran V	: Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Lampiran VI	: Satuan Polisi Pamong Praja
Lampiran VII	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Lampiran VIII	: Dinas Pemadam Kebakaran
Lampiran IX	: Dinas Sosial
Lampiran X	: Dinas Ketenagakerjaan
Lampiran XI	: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Lampiran XII	: Dinas Ketahanan Pangan
Lampiran XIII	: Dinas Lingkungan Hidup

Lampiran XIV	: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Lampiran XV	: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Lampiran XVI	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Lampiran XVII	: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Lampiran XVIII	: Dinas Perhubungan
Lampiran XIX	: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Lampiran XX	: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Lampiran XXI	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu
Lampiran XXII	: Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Lampiran XXIII	: Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik
Lampiran XXIV	: Dinas Kebudayaan
Lampiran XXV	: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Lampiran XXVI	: Dinas Pariwisata
Lampiran XXVII	: Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Lampiran XXVIII	: Dinas Peternakan
Lampiran XXIX	: Dinas Perindustrian
Lampiran XXX	: Dinas Perdagangan
Lampiran XXXI	: Dinas Kelautan dan Perikanan
Lampiran XXXII	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lampiran XXXIII	: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Lampiran XXXIV	: Badan Pendapatan Daerah
Lampiran XXXV	: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Lampiran XXXVI	: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Lampiran XXXVII	: Inspektorat Daerah
Lampiran XXXVIII	: Sekretariat DPRD
Lampiran XXXIX	: Sekretariat Daerah
Lampiran XL	: Kecamatan Lamuru
Lampiran XLI	: Kecamatan Dua Boccoe
Lampiran XLII	: Kecamatan Sibulue
Lampiran XLIII	: Kecamatan Barebbo
Lampiran XLIV	: Kecamatan Cina
Lampiran XLV	: Kecamatan Mare
Lampiran XLVI	: Kecamatan Awangpone
Lampiran XLVII	: Kecamatan Tellu Siattinge
Lampiran XLVIII	: Kecamatan Cenrana
Lampiran XLIX	: Kecamatan Ajangale
Lampiran L	: Kecamatan Amali

Lampiran LI	: Kecamatan Palakka
Lampiran LII	: Kecamatan Ulaweng
Lampiran LIII	: Kecamatan Bengo
Lampiran LIV	: Kecamatan Tellu Limpoe
Lampiran LV	: Kecamatan Lappariaja
Lampiran LVI	: Kecamatan Patimpeng
Lampiran LVII	: Kecamatan Ponre
Lampiran LVIII	: Kecamatan Libureng
Lampiran LIX	: Kecamatan Bontocani
Lampiran LX	: Kecamatan Kahu
Lampiran LXI	: Kecamatan Kajuara
Lampiran LXII	: Kecamatan Tonra
Lampiran LXIII	: Kecamatan Salomekko
Lampiran LXIV	: Kecamatan Tanete Riattang
Lampiran LXV	: Kecamatan Tanete Riattang Barat
Lampiran LXVI	: Kecamatan Tanete Riattang Timur

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2021, Perangkat Daerah menggunakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 sebagai rujukan penyusunan program dan kegiatan.
- (2) Perangkat Daerah menggunakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 6

Bappeda menelaah kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dengan RKPD Tahun 2021.

Pasal 7

Isi beserta uraian Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV
PENUTUP**

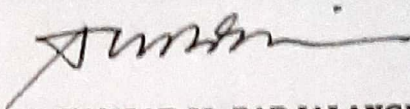
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 21 Juli 2020

BUPATI BONE,



A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 21 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE



ANDI ISLAMUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2020 NOMOR



**BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI BONE
NOMOR 541 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
KECAMATAN TELLU SIATTINGE KABUPATEN BONE
TAHUN 2021**

BUPATI BONE,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone Tahun 2021 yang terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan serta memberi pedoman dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021, maka diperlukan Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bone tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone Tahun 2021.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Daerah tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
19. Peraturan Bupati Bone Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 09 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 9);
21. Peraturan Bupati Bone Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 55);
22. Peraturan Bupati Bone Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone Tahun 2021 adalah :

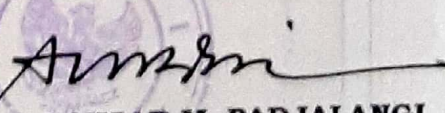
- a. mengumpulkan data dan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terkait dengan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone Tahun 2021;
- b. menyusun Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone Tahun 2021, mulai dari Rancangan Awal, Rancangan Akhir hingga ditetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021, termasuk perubahannya dalam masa tahun pelaksanaannya;
- c. melakukan evaluasi, koordinasi dan pengendalian dalam penyusunan kebijakan terkait Rencana Kerja Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone Tahun 2021; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkan Keputusan ini, bersumber pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPA & DPPA) Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan Bupati Bone ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 30 Desember 2019

BUPATI BONE,



A. FAHSAR M. PADJALANGI


Tembusan Kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Bone di Watampone;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone di Watampone;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone di Watampone;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bone di Watampone;
5. Masing – masing yang bersangkutan di Tempat;
6. Peringgal.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BONE
NOMOR 541 TAHUN 2019,
TANGGAL 30 DESEMBER 2019
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA
KECAMATAN TELLU SIATTINGE
KABUPATEN BONE TAHUN 2021

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
KECAMATAN TELLU SIATTINGE KABUPATEN BONE
TAHUN 2021**

Pembina : Bupati Bone
Wakil Bupati Bone
Pengarah : Sekretaris Daerah
Ketua Tim : Camat Tellu Siattinge
Sekretaris : Sekretaris Camat Tellu Siattinge
Kelompok Kerja : 1. Kasubag Program dan Keuangan
2. Kasi Pemerintahan dan Kependudukan
3. Kasi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4. Kasi Perekonomian PAD dan Kesejahteraan Rakyat
5. Kasi Pelayanan Umum
6. Bendahara Pengeluaran
7. Operator SIPPD

BUPATI BONE,

A. FAHSAR M. PADJALANGI

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat taufik serta HidayahNya sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tellu Siattinge Tahun 2021, Rencana Kerja ini merupakan suatu wujud dari model penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) yang tertuang dalam Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tellu Siattinge Tahun 2021.

Rencana Kerja tahun 2021 memaparkan evaluasi kinerja Kecamatan Tellu Siattinge di Tahun 2019 dan Tahun 2020 serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Tahun 2021 sehingga diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi aparatur dalam menentukan prioritas-prioritas pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Di sisi lain Renja ini juga berisikan indikator-indikator kinerja sehingga dapat dijadikan evaluasi atau tolak ukur kinerja di akhir tahun yang sangat bermanfaat untuk mengetahui capaian kinerja Kecamatan Tellu Siattinge dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bone.

Demikian Rencana Kerja ini kami susun sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sehingga menjadi tolak ukur dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Kecamatan Tellu Siattinge Tahun 2021.

Tokaseng, 24 Juli 2020

CAMAT TELLU SIATTINGE



A. KUSAYYENG, S.Sos, M.Si

Pangkat : Pembina,

Nip : 191231 19802 1 020

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	3
	1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
	1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II	HASIL EVALUASI PN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	8
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	8
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	21
	2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	29
	2.4. Review terhadap Rancangan awal RKPD	29
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat	41
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	42
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	42
	3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah ...	43
	3.3. Program dan Kegiatan	43
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	46
BAB V	PENUTUP	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Tahun 2021 Perangkat Daerah Kecamatan Tellu Siattinge yang selanjutnya disebut (RENJA) adalah dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah Kecamatan Tellu Siattinge, dan pelaksanaan tugas pelayanan public sebagai tindak lanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan sifat pelayananan perangkat daerah yang dicapai pada masa satu tahun.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 perangkat daerah Kecamatan Tellu Siattinge dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah dimana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan, hal ini diperkuat dengan pernyataan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat 1, Pemberian Kewenangan Kepala Daerah kepada Camat, dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dengan adanya kewenangan diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi Kecamatan dan keanekaragaman sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan antara Perencanaan Daerah dengan Perencanaan Kecamatan, maka perencanaan tujuan kecamatan mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan bersinergi dengan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 PD Kecamatan Tellu Siattinge memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi PD Kecamatan Tellu Siattinge secara substansial sesuai dengan Visi, Misi, agenda PD dan rencana resmi daerah (RKPD, RPJMD dan Renstra PD) dengan Renja K/L dan Renja LProvinsi/Kabupaten serta tindak lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD, sesuai dengan amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004, Perencanaan Pembangunan harus mencakup 5 (lima) pendekatan yaitu :

1. Pendekatan politis, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung, maka program-program yang ditawarkan oleh Kandidat Kepala Daerah pada saat melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses perencanaan pembangunan.
2. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan harus menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah.
3. Pendekatan partisipatif masyarakat dimana proses pentusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan (Stake holder) terhadap pembangunan.
4. Pendekatan Top – Down (Atas – Bawah) yaitu bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan program – program jenjang pemerintah di atasnya.
5. Pendekatan Bottom – Up (Bawah – Atas) yaitu penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan Stake holder atau jenjang pemerintah dibawahnya, hasil proses penyusunan rencana pembangunan, top Down dan Bottom Up diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang.

Rencana Kerja (RENJA) PD Kecamatan Tellu Siattinge Tahun 2021 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD, mengacu kepada Rancangan RKPD Kabupaten Bone Tahun 2021, RENSTRA PD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 Kecamatan Tellu Siattinge adalah:

1. Undang – undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 44211);
4. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang – undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone tahun 2019 Nomor 3);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023.
17. Peraturan Bupati Bone Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) PD Kecamatan Tellu Siattinge Tahun 2021, dimaksudkan sebagai bentuk penjabaran Visi, Misi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan Kepala Daerah untuk mencapai program-program, kebijakan -kebijakan dan tujuan pembangunan yang termuat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bone, serta sebagai kunci keberhasilan strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan Pemerintah, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang maksimal.

Berpijak pada maksud tersebut, maka tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) PD Kecamatan Tellu Siattinge Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Sebagai acuan Kecamatan Tellu Siattinge dalam mengoperasionalkan RKPD Kab. Bone tahun 2021 sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Tellu Siattinge dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kab. Bone;
- Menetapkan program dan kegiatan Kecamatan Tellu Siattinge Tahun 2021;
- Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan Kecamatan Tellu Siattinge Tahun 2021.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Kecamatan Kecamatan Tellu Siattinge Tahun 2021, disusun berdasarkan tata urutan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Kecamatan, proses penyusunan Rencana Kerja Kecamatan, keterkaitan antara Rencana Kerja Kecamatan dengan dokumen RKPD, Renstra Kecamatan, dengan Rencana Kerja K/L dan Rencana Kerja Provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Kecamatan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Kecamatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Kecamatan serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tahun lalu

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Kecamatan Tahun Lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1).

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan

2.3 Isu – isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan

2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan dan Sasaran Kecamatan

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.

3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Kecamatan

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan.

3.3 Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan

Bab V Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI PN RENCANA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Kecamatan Tellu Siattinge merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Tellu Siattinge. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tellu Siattinge ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Tellu Siattinge selama Tahun 2019 dan Tahun berjalan 2020 serta perkiraan target anggaran Tahun 2021.

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Kecamatan Kecamatan Tellu Siattinge 2019 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2019 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil – hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh, yang kesemuanya itu tertuang dalam Tabel T-C.29 berikut :

Tabel T-C.29.
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN DAN
PENCAPAIAN RENSTRA KECAMATAN S/D TAHUN 2020 BERDASARKAN PERMEN 13
PROVINSI SULAWESI SELATAN KABUPATEN BONE

Nama Kecamatan : KECAMATAN TELLU SIATTINGE

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kecamatan) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 20..)			Target Program dan Kegiatan (Renja Kecamatan Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Kecamatan s/d Tahun berjalan	
								Target Renja Kecamatan Tahun 2019	Realisasi Renja Kecamatan Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	20			OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN									
1	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)								
1	20	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik, Telpon/wifi, dan Air (Rekening)	180	36	36	36	100%	36	108	60%

1	20	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi yang mendapatkan Jasa Administrasi Keuangan selama Setahun (Orang)	720	144	172	144	84%	12	300	42%
1	20	1	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pembayaran Media yang menyediakan Bahan Bacaan (Media)	60	12	12	12	100%	12	36	60%
1	20	01	23	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah Kegiatan Rutin Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tupoksi Organisasi yang diikuti (Kegiatan)	1.320	90	90	90	100%	120	300	23%
1	20	01	24	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pendukung Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (Paket)	300	12	12	12	100%	5	29	10%
1	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)								
1	20	2	'05	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (unit)	1	1	1	1	100%	0	1	100%

1	20	2	07	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor (Unit)	25	2	2	2	100%	0	4	16%
1	20	2	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor (Unit)	25	3	3	3	100%	3	9	36%
1	20	02	10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah pengadaan mebeleur (Paket)	15	3	3	3	100%	3	9	60%
1	20	02	22	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor (Kegiatan)	60	12	12	12	100%	2	26	43%
1	20	02	24	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas /Operasional (Paket)	25	4	4	4	100%	5	13	52%
1	20	02	45	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi berat	3	1	1	1	100%	0	2	67%
1	20	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)								
1	20	03	05	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pengadaan pakaian Khusus hari-hari-tertentu (Pasang)	160	40	40	40	100%	0	80	50%

1	20	08		Program Penunjang Pemerintahan Umum	Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum (%)								
1	20	08	01	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kecamatan yang tersusun (Dokumen)	32	5	5	5	100%	6	16	50%
1	20	19		Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Dana Desa (%)								
1	20	19	06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (ADD, TPAPD dan Penyisihan PBB)	Jumlah Laporan hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan dana desa (Laporan)	75	15	15	15	100%	15	45	60%
1	20	20		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan (%)								
1	20	20	07	Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif	Jumlah Operasional Pengawasan Tripika (Kali)	180	96	36	36	100%	36	168	93%
1	20	31		Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan									

1	20	31	01	Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan FKKS dan TKSK (Dokumen)	10	2	3	2	67%	2	6	60%
1	20	31	34	Peningkatan Operasional Tokaseng	Jumlah Operasional Kelurahan Tokaseng (Kegiatan)	60	12	12	12	100%	1	25	42%
1	20	31	35	Peningkatan Operasional Otting	Jumlah Operasional Kelurahan Otting (Kegiatan)	60	12	12	12	100%	1	25	42%
1	20	80		Program Pembanguan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
1	20	80	503	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman Lainnya Kelurahan Tokaseng	Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman Lainnya Kelurahan Tokaseng (Paket)	4	1	1	1	100%	1	3	75%
1	20	80	504	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transport Jalan Pemukiman Kelurahan Tokaseng	Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transport Jalan Pemukiman Kelurahan Tokaseng	5	0	0	0	0	1	1	20%

1	20	80	508	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan; dan/atau Pos Pelayanan Terpadu dan Pos Pembinaan Terpadu; dan/atau Kelurahan Tokaseng	Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan; dan/atau Pos Pelayanan Terpadu dan Pos Pembinaan Terpadu; dan/atau Kelurahan Tokaseng (Paket)	4	0	0	0	0	1	1	25%
1	20	80	522	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman Lainnya Kelurahan Otting	Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman Lainnya Kelurahan (Paket)	5	1	1	1	100s%	0	2	40%
1	20	80	525	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Sarana Prasarana Transportasi Lainnya Kelurahan Otting	Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Sarana Prasarana Transportasi Lainnya Kelurahan Otting (Paket)	5	1	1	1	100%	1	3	60%
1	20	81		<i>Program Pemberdayaan Masyarakat</i>	<i>Cakupan Penyelenggaraan Kegiatan Pemeberdayaan Masyarakat (%)</i>								

1	20	81	495	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat; Pelayanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Keluhan Tokaseng	Jumlah Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat; Pelayanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kelurahan Tokaseng (Paket)	12	0	0	0	0%	3	3	25%
1	20	81	514	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat; Pelayanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Keluhan Otting	Jumlah Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat; Pelayanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kelurahan Otting (paket)	12	0	0	0	0%	3	3	25%

Tabel T-C.29.
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN DAN
PENCAPAIAN RENSTRA KECAMATAN S/D TAHUN 2020 BERDASARKAN PMDN-90
PROVINSI SULAWESI SELATAN KABUPATEN BONE

Nama Kecamatan: KECAMATAN TELLU SIATTINGE

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kecamatan) Tahun2018- 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 20..)			Target Program dan Kegiatan (Renja Kecamatan Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Kecamatan s/d Tahun berjalan	
									Target Renja Kecamatan Tahun 2019	Realisasi Renja Kecamatan Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7					URUSAN KEWILAYAN									
7	01				KECAMATAN									
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Realisasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)								
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kinerja serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun								
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah (dokumen)	8	1	1	1	100%	2	4	50%

7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang tersusun (dokumen)	7	1	1	1	100%	1	3	43%
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (dokumen)	6	1	1	1	100%	1	3	50%
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun (dokumen)	6	1	1	1	100%	1	3	50%
7	01	01	03		Administrasi Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia sesuai rencana kebutuhan								
7	01	01	03	20	Pengadaan Kendaraan dinas Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional (unit)	1	0	1	1	100%	0	1	100%
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sarana yang tersedia sesuai rencana kebutuhan								
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu (stel)	160	40	40	40	100%	0	80	50%
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia sesuai rencana kebutuhan								
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pdnediaan Peralatan dan Perlengkapan Penunjang Administrasi Perkantoran sesuai rencana kebutuhan (paket)	100	4	4	4	100%	4	12	12%

7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Pegawai dan Tamu sesuai rencana kebutuhan (paket)	100	4	4	4	100%	4	12	12%
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sesuai rencana kebutuhan (paket)	100	4	4	4	100%	4	12	12%
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pembayaran Media yang menyediakan Bahan Bacaan (kali)	60	12	12	12	100%	12	36	60%
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Rutin Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tupoksi Organisasi yang diikuti (kegiatan)	1.320	90	90	90	100%	120	300	23%
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7	01	01	2.06	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel (mebel)	15	3	3	3	100%	3	9	60%
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (unit)	50	5	5	5	100%	3	13	26%
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik, Telp/Wifi dan Air (rekening)	180	36	36	36	100%	36	108	60%
7	01	01	2.08	04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum	Jumlah Tenaga Administrasi yang mendapatkan Jasa Administrasi Keuangan selama setahun (orang)	720	144	172	144	84%	12	300	42%

7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (unit)	25	4	4	4	100%	5	13	52%
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (kegiatan)	63	12	12	12	100%	2	26	41%
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Realisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)								
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah (paket)	5	1	1	1	100%	1	3	60%
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)								
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa								
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan FKKS dan TKSK (dokumen)	10	2	3	2	67%	2	6	60%

7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (paket)	23	3	3	3	100%	4	10	43%
7	01	03	2.02		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, Pelayanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kelurahan (dokumen)	12	0	0	0	0%	3	3	25%
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan (%)								
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum								
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Operasional Tripika (kali)	180	96	36	36	100%	36	168	93%
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Dana Desa (%)								
7	01	06	2.02		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (ADD, TPAPD dan Penyisihan PBB)(laporan)	75	15	15	15	100%	15	45	60%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dilakukan melalui: Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Tellu Siattinge sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Berikut Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Tellu Siattinge yang dijabarkan ke dalam table T-C.30 berikut:

Tabel T-C.30.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN TELLU SIATTINGE
PROVINSI SULAWESI SELATAN KABUPATEN BONE BERDASARKAN PMDN-13

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019/K	Tahun 2020/K	Tahun 2021/K	Tahun 2022/K	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Jumlah Rekening Listrik, Telpon/wifi, dan Air (Rekening)			36	36	36	36	36	36	36	36	
2	Jumlah Tenaga Administrasi yang mendapatkan Jasa Administrasi Keuangan selama Setahun (Orang)			144	144	144	144	144	144	144	144	
3	Jumlah Pembayaran Media yang menyediakan Bahan Bacaan (Media)			12	12	12	12	12	12	12	12	
4	Jumlah Kegiatan Rutin Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tupoksi Organisasi yang diikuti (Kegiatan)			240	252	264	276	240	252	264	276	
5	Jumlah Pendukung Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (Paket)			60	60	60	60	60	60	60	60	
6	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (unit)			1	0	0	0	1	0	0	0	
7	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor (Unit)			5	5	5	5	5	5	5	5	

8	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor (Unit)			5	5	5	5	5	5	5	5	
9	Jumlah pengadaan mebeleur (Paket)			3	3	3	3	3	3	3	3	
10	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor (Kegiatan)			12	12	12	12	12	12	12	12	
11	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas /Operasional (Paket)			5	5	5	5	5	5	5	5	
12	Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi berat			1	0	1	0	1	0	1	0	
13	Jumlah Pengadaan pakaian Khusus hari-hari-tertentu (Pasang)			40	0	45	45	40	0	45	45	
14	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kecamatan yang tersusun (Dokumen)			7	6	7	6	7	6	7	6	
15	Jumlah Laporan hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan dana desa (Laporan)			15	15	15	15	15	15	15	15	
16	Jumlah Operasional Pengawasan Tripika (Kali)			36	36	36	36	36	36	36	36	
17	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan FKKS dan TKSK (Dokumen)			2	2	2	2	2	2	2	2	
18	Jumlah Operasional Kelurahan Tokaseng (Kegiatan)			12	12	12	12	12	12	12	12	

19	Jumlah Operasional Kelurahan Otting (Kegiatan)			12	12	12	12	12	12	12	12	
20	Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman Lainnya Kelurahan Tokaseng			0	1	1	1	0	1	1	1	
21	Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transport Jalan Pemukiman Kelurahan Tokaseng			1	1	1	1	1	1	1	1	
22	Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan; dan/atau Pos Pelayanan Terpadu dan Pos Pembinaan Terpadu; dan/atau Kelurahan Tokaseng (Paket)			0	1	1	1	0	1	1	1	
23	Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman Lainnya Kelurahan Otting(Paket)			1	1	1	1	1	1	1	1	

24	Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Lainnya Kelurahan Otting (Paket)			1	1	1	1	1	1	1	1	
25	Jumlah Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat; Pelayanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kelurahan Tokaseng (Paket)			0	1	1	1	0	1	1	1	
26	Jumlah Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat; Pelayanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kelurahan Otting (paket)			0	1	1	1	0	1	1	1	

Tabel T-C.30.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN TELLU SIATTINGE BERDASARKAN PMDN 90
PROVINSI SULAWESI SELATAN KABUPATEN BONE

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019/K	Tahun 2020/K	Tahun 2021/K	Tahun 2022/K	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah (dokumen)			2	1	2	1	2	1	2	1	
2	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang tersusun (dokumen)			1	1	1	1	1	1	1	1	
3	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (dokumen)			1	1	1	1	1	1	1	1	
4	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun (dokumen)			2	2	2	2	2	2	2	2	
5	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun (dokumen)			2	2	2	2	2	2	2	2	
6	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional (unit)			1	0	0	0	1	0	0	0	
7	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu (stel)			40	0	45	45	40	0	45	45	

8	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Penunjang Administrasi Perkantoran sesuai rencana kebutuhan (paket)			20	20	20	20	20	20	20	20	
9	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Pegawai dan Tamu sesuai rencana kebutuhan (paket)			20	20	20	20	20	20	20	20	
10	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sesuai rencana kebutuhan (paket)			20	20	20	20	20	20	20	20	
11	Jumlah Pembayaran Media yang menyediakan Bahan Bacaan (kali)			12	12	12	12	12	12	12	12	
12	Jumlah Kegiatan Rutin Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tupoksi Organisasi yang diikuti (kegiatan)			240	252	264	276	240	252	264	276	
13	Jumlah Pengadaan Mebel (paket)			3	3	3	3	3	3	3	3	
14	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (unit)			10	10	10	10	10	10	10	10	
15	Jumlah Rekening Listrik, Telpon/Wifi dan Air (rekening)			36	36	36	36	36	36	36	36	
16	Jumlah Tenaga Administrasi yang mendapatkan Jasa Administrasi Keuangan selama setahun (orang)			144	144	144	144	144	144	144	144	

17	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (unit)			5	5	5	5	5	5	5	5	
18	Jumlah Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (kegiatan)			12	12	12	12	12	12	12	12	
19	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah (paket)			1	1	1	1	1	1	1	1	
20	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan FKKS dan TKSK (dokumen)			2	2	2	2	2	2	2	2	
21	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (paket)			3	7	7	7	0	7	7	7	
22	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, Pelayanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kelurahan (dokumen)			0	1	1	1	0	1	1	1	
23	Jumlah Operasional Tripika (kali)			36	36	36	36	36	36	36	36	
24	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (ADD, TPAPD dan Penyisihan PBB) (laporan)			15	15	15	15	15	15	15	15	

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Secara umum isu – isu penting/strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Tellu Siattinge adalah sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Camat kepada para Pemangku jabatan fungsional di Bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di kantor Camat Tellu Siattinge.
2. Pelayanan Prima Kecamatan Tellu Siattinge sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Bone yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku.
3. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat.
4. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan Tellu Siattinge harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pemabangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tellu Siattinge serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Bone. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Tellu Siattinge diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan.

- a. Perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan. Dalam RKPD 2019 Kecamatan Tellu Siattinge mengusulkan 6 Program dengan 17 kegiatan, dan pada tahun 2019 Perangkat Daerah Kecamatan Tellu Siattinge melaksanakan 6 Program dan 17 Kegiatan.
- b. Penjelasan mengenai temuan dan catatan penting. Program dan kegiatan pada Kecamatan Tellu Siattinge mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bone.

Adapun review terhadap rancangan awal RKPD terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD tertuang dalam tabel T-C.31 berikut ini :

Tabel T-C.31.
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2020 BERDASRARKAN PMDN-13
KECAMATAN TELLU SIATTINGE

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp 120.962.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp 133.058.200
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Rekening Listrik, Telpon/wifi, dan Air (Rekening)	36 rekening	Rp 11.700.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Rekening Listrik, Telpon/wifi, dan Air (Rekening)	36 rekening	Rp 12.870.000
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Tenaga Administrasi yang mendapatkan Jasa Administrasi Keuangan selama Setahun (Orang)	12 orang	Rp 31.392.000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Tenaga Administrasi yang mendapatkan Jasa Administrasi Keuangan selama Setahun (Orang)	12 orang	Rp 34.531.200
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Pembayaran Media yang menyediakan Bahan Bacaan (Media)	12 media	Rp 3.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Pembayaran Media yang menyediakan Bahan Bacaan (Media)	12 media	Rp 3.300.000

	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Kegiatan Rutin Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tupoksi Organisasi yang diikuti (Kegiatan)	120 kegiatan	Rp 29.000.000	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Kegiatan Rutin Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tupoksi Organisasi yang diikuti (Kegiatan)	121 kegiatan	Rp 31.900.000
	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Pendukung Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (Paket)	5 Paket	Rp 45.870.000	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Pendukung Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (Paket)	6 Paket	Rp 50.457.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		<i>Cakupan Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>		Rp 77.334.400	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		<i>Cakupan Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>		Rp 85.067.840
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor (Unit)	3 Unit	Rp 13.500.000	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor (Unit)	3 Unit	Rp 14.850.000
	Pengadaan Mebeleur	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah pengadaan mebeleur (Paket)	3 Paket	Rp 7.000.000	Pengadaan Mebeleur	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah pengadaan mebeleur (Paket)	3 Paket	Rp 7.700.000
	Pemeliharaan Rutin.Berkala Gedung Kantor	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor (Kegiatan)	12 Kegiatan	Rp 12.000.000	Pemeliharaan Rutin.Berkala Gedung Kantor	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor (Kegiatan)	12 Kegiatan	Rp 13.200.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas /Operasional (Paket)	5 Paket	Rp 44.834.400	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas /Operasional (Paket)	5 Paket	Rp 49.317.840
3	Program Penunjang Pemerintahan Umum		<i>Cakupan Realisasi KegiatanPenunjang Pemerintahan</i>			Program Penunjang Pemerintahan Umum		<i>Cakupan Realisasi KegiatanPenunjang Pemerintahan</i>		

	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kecamatan yang tersusun (Dokumen)	6 Dokumen	Rp 30.900.000	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kecamatan yang tersusun (Dokumen)	7 Dokumen	Rp 33.990.000
4	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Dana Desa			Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Dana Desa		
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (ADD, TPAPD dan Penyisihan PBB)	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan dana desa	15 laporan	Rp 15.000.000	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (ADD, TPAPD dan Penyisihan PBB)	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan dana desa	15 laporan	Rp 16.500.000
5	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan			Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan		
	Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Operasional Pengawasan Tripika	36 kali	Rp 57.000.000	Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Operasional Pengawasan Tripika	36 kali	Rp 62.700.000
6	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan		Persentase Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan			Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan		Persentase Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan		

	Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan FKKS dan TKSK	2 Dokumen	Rp 27.400.000	Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan FKKS dan TKSK	2 Dokumen	Rp 30.140.000
	Peningkatan Operasional Kelurahan Tokaseng	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Operasional Kelurahan Tokaseng	12 Kegiatan	Rp 116.000.000	Peningkatan Operasional Kelurahan Tokaseng	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Operasional Kelurahan Tokaseng	12 Kegiatan	Rp 127.600.000
	Peningkatan Operasional Kelurahan Otting	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Operasional Kelurahan Otting	12 Kegiatan	Rp 116.000.000	Peningkatan Operasional Kelurahan Otting	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Operasional Kelurahan Otting	12 Kegiatan	Rp 127.600.000
7	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Cakupan Realisasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Cakupan Realisasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman Lainnya Kelurahan Tokaseng	Kel. Tokaseng	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman Lainnya Kelurahan Tokaseng	1 Kegiatan	Rp 119.000.000	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman Lainnya Kelurahan Tokaseng	Kec. Tellu Siattinge	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman Lainnya Kelurahan Tokaseng	1 Kegiatan	Rp 130.900.000

	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan Pemukiman Kelurahan Tokaseng	Kel. Tokaseng	Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan Pemukiman Kelurahan Tokaseng	1 Kegiatan	Rp 200.000.000	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan Pemukiman Kelurahan Tokaseng	Kel. Tokaseng	Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan Pemukiman Kelurahan Tokaseng	1 Kegiatan	Rp 220.000.000
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Jalan Pemukiman Kelurahan Tokaseng	Kel. Tokaseng	Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Jalan Pemukiman Kelurahan Tokaseng	1 Kegiatan	Rp 65.000.000	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Jalan Pemukiman Kelurahan Tokaseng	Kel. Tokaseng	Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Jalan Pemukiman Kelurahan Tokaseng	1 Kegiatan	Rp 71.500.000
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman Lainnya Kelurahan Otting	Kel. Otting	Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman Lainnya Kelurahan Otting	1 Kegiatan	Rp 184.000.000	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman Lainnya Kelurahan Otting	Kel. Otting	Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman Lainnya Kelurahan Otting	1 Kegiatan	Rp 198.000.000

	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Sarana Prasarana Transportasi Lainnya Kelurahan Otting	Kel. Otting	Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Sarana Prasarana Transportasi Lainnya Kelurahan Otting	1 Kegiatan	Rp 200.000.000	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Sarana Prasarana Transportasi Lainnya Kelurahan Otting	Kel. Otting	Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Sarana Prasarana Transportasi Lainnya Kelurahan Otting	1 Kegiatan	Rp 220.000.000
8	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan			Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan		
	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat; Pelayanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kelurahan Tokaseng	Kel. Tokaseng	Jumlah Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat; Pelayanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kelurahan Tokaseng	3 paket	Rp 22.300.000	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat; Pelayanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kelurahan Tokaseng	Kel. Tokaseng	Jumlah Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat; Pelayanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kelurahan Tokaseng	3 paket	Rp 27.500.000
	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat; Pelayanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kelurahan Otting	Kel. Otting	Jumlah Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat; Pelayanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kelurahan Otting	3 Paket	Rp 25.000.000	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat; Pelayanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kelurahan Otting	Kel. Otting	Jumlah Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat; Pelayanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kelurahan Otting	3 Paket	Rp 27.500.000

Tabel T-C.31.
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2020 BERDASARKAN PMDN-90
KECAMATAN TELLU SIATTINGE

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Realisasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)		775.204.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Realisasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)		852.224.400
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah (dokumen)	3 dokumen	14.175.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah (dokumen)	3 dokumen	15.592.500
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang tersusun (dokumen)	1 dokumen	25.480.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang tersusun (dokumen)	1 dokumen	28.028.000
3	Koordinasi dan Peanyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (dokumen)	1 dokumen	2.861.000	Koordinasi dan Peanyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (dokumen)	1 dokumen	3.147.100
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun	1 dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun	1 dokumen	2.200.000
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun (dokumen)	1 dokumen	2.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun (dokumen)	1 dokumen	2.200.000

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
7	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu (stel)	25 stel	5.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu (stel)	25 stel	5.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah						Administrasi Umum Perangkat Daerah					
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Penunjang Administrasi Perkantoran sesuai rencana kebutuhan (paket)	1 paket	250.260.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Penunjang Administrasi Perkantoran sesuai rencana kebutuhan (paket)	1 paket	275.286.000	
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Pegawai dan Tamu sesuai rencana kebutuhan (paket)	1 paket	150.100.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Pegawai dan Tamu sesuai rencana kebutuhan (paket)	1 paket	159.830.000	
10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sesuai rencana kebutuhan (paket)	1 paket	9.620.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sesuai rencana kebutuhan (paket)	1 paket	10.582.000	
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Pembayaran Media yang menyediakan Bahan Bacaan (kali)	12 kali	3.600.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Pembayaran Media yang menyediakan Bahan Bacaan (kali)	12 kali	3.960.000	
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Kegiatan Rutin Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tupoksi Organisasi yang diikuti (kegiatan)	264 kegiatan	18.336.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Kegiatan Rutin Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tupoksi Organisasi yang diikuti (kegiatan)	264 kegiatan	25.449.600	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
13	Pengadaan Mebel	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Pengadaan Mebel (paket)	3 paket	21.000.000	Pengadaan Mebel	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Pengadaan Mebel (paket)	3 paket	23.100.000	
14	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (unit)	5 unit	16.431.180	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (unit)	5 unit	18.074.298	

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Rekening Listrik, Telpon/Wifi dan Air (rekening)	36 rekening'	11.106.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Rekening Listrik, Telpon/Wifi dan Air (rekening)	36 rekening'	12.216.600
	Penyediaan jasa Pelayanan Umum	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Tenaga Administrasi yang mendapatkan Jasa Administrasi Keuangan selama setahun (orang)	144 orang	148.233.600	Penyediaan jasa Pelayanan Umum	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Tenaga Administrasi yang mendapatkan Jasa Administrasi Keuangan selama setahun (orang)	144 orang	163.056.960
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (unit)	5 unit	74.470.720	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (unit)	5 unit	81.917.792
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (kegiatan)	12 kegiatan	20.530.500	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (kegiatan)	12 kegiatan	22.583.550
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Cakupan Realisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)		18.600.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Cakupan Realisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)		20.460.000
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah (paket)	1 paket	18.600.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah (paket)	1 paket	20.460.000

	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)		505.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)		554.700.000
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan FKKS dan TKSK (dokumen)	2 dokumen	15.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan FKKS dan TKSK (dokumen)	2 dokumen	16.500.000
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (paket)	2 paket	448.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (paket)	2 paket	492.000.000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, Pelayanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kelurahan (dokumen)	2 dokumen	42.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, Pelayanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kelurahan (dokumen)	2 dokumen	46.200.000
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan (%)		58.900.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan (%)		64.790.000
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum						Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Operasional Tripika (kali)	36 kali	58.900.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Operasional Tripika (kali)	36 kali	64.790.000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Dana Desa (%)		18.500.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Dana Desa (%)		20.350.000
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (ADD, TPAPD dan Penyisihan PBB)(laporan)	15 laporan	18.500.000	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (ADD, TPAPD dan Penyisihan PBB)(laporan)	15 laporan	20.350.000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat

1. Bahwa Usulan Program / Kegiatan yang dibahas di dalam Musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun / Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke forum Musrenbangdes.
2. Di Forum Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa untuk mengawal usulan tersebut di Forum Musrenbang Tingkat Kecamatan.
3. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta isu - isu penting dari masing – masing SKPD yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan.

Pemerintah Kecamatan Tellu Siattinge dalam pelaksanaan pembangunan menggunakan suatu model yang disebut ***Sistem Maajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP)*** yang bermakna bahwa ide pembangunan tidak dari pemerintah kepada masyarakat (Top Down) tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat untuk memberikan usulan – usulan pembangunan kepada Pemerintah (Bottom Up) dalam wadah kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan hingga tingkat kabupaten.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Sebagai suatu keharusan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menetapkan tujuan sasaran dan program kegiatan, maka dari itu perlu diukur kinerja dari setiap Perangkat Daerah termasuk untuk dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah baik Tingkat Kota, Provinsi maupun Kebijakan Nasional.

Penentuan prioritas dan sasaran pembangunan nasional Tahun 2021 tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bone sesuai tema Tahun 2021 adalah ***“Penguatan Kapasitas Daerah Dalam Meningkatkan Investasi Yang Kondusif Menuju Sustainable Development”***.

Adapun Prioritas Nasional, Propinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bone terkait dengan prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 disajikan dalam table berikut ini :

No	Nasional	Sulawesi Selatan	Kabupaten Bone
1	Rancangan Teknokratik RPJMN 2020 - 2024	Perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan public	Peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung pelayanan public yang berkualitas
2		Penguatan infrastruktur wilayah	Pengembangan ekonomi daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat
3		Pengembangan Kawasan pusat pertumbuhan	Peningkatan pelayanan Pendidikan, kesehatan, dan sosial dasar lainnya
4		Penurunan kesenjangan sosial ekonomi	Percepatan pembangunan daerah yang bertumpu pada desa dan Kawasan perdesaan
5		Pembangunan Manusia	Pengembangan inovasi daerah untuk mendukung pembangunan daerah dan pelayanan publik
6		Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	Penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong pengembangan usaha
7		Pelestarian lingkungan hidup	Stabilitas keamanan, ketertiban, ketentraman dalam kemajemukan masyarakat

Tabel diatas menunjukkan adanya sinkronisasi kebijakan nasional dan provinsi dengan arah kebijakan dan program Kabupaten Bone.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2020 adalah implementasi Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bone, sebagai berikut

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan public
2. Menciptakan keamanan dan dan ketertiban masyarakat.
3. Meningkatkan akses, pemeratan dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya.
4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan..
5. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan public.
6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

Sasaran Renja Kecamatan Kecamatan Tellu Siattinge Tahun 2021 sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan public.
- b. Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

3.3 Program dan Kegiatan

- a. Faktor – factor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Kecamatan Tellu Siattinge 2021

Dalam merumuskan program kegiatan, Kecamatan Tellu Siattinge mempertimbangkan beberapa faktor penting. Factor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan progam dan kegiatan antara lain:

- Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah,
- Pencapaian SDGs;
- Pengentasan kemiskinan,
- Pencapaian NSPK dan SPM,
- Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
- Pengembangan daerah terisolir,

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Dengan memperhatikan arah pembangunan daerah Kabupaten Bone pada Tahun 2021, maka Kecamatan Tellu Siattinge merumuskan Rancanagan Awal Rencana Kerja Tahun 2021 yang terdiri dari 5 Program, 12 Kegiatan, dan 24 Sub Kegiatan. Adapun Program, Kegiatan, dan Sub Keegiatannya yang tersebut sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
kabupaten/Kota

- **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

1. Pengadaan Pakaian Dins beserta atribut kelengkapannya

- **Administrasi Umum Perangkat Daerah**

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

1. Pengadaan Mebel
2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- **Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**
 1. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**
 1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**
 1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**
 1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**
 1. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap perangkat daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah. Penyusunan RENJA berpedoman pada Renstra Kecamatan Tellu Siattinge dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bone. Penyusunan RENJA bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja Kecamatan Tellu Siattinge merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Tellu Siattinge. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam Rencana Kerja (RENJA). Rumusan Rencana Kerja dan pendanaan Perangkat daerah Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini :

PEMERINTAH KABUPATEN BONE
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022

SKPD : 7-01.0-0.0-0.19 KECAMATAN TELLU SIATTINGE

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2022	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7									13.338.056.401,00				14.748.464.723,00
7	01								13.338.056.401,00				14.748.464.723,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				12.737.056.401,00				14.087.364.723,00
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				23.584.000,00				25.942.400,00
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Kecamatan Tellu Siattinge	3 Dokumen	14.175.000,00	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Dokumen	15.592.500,00
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang tersusun	Kecamatan Tellu Siattinge	1 Dokumen	2.548.000,00	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	2.802.800,00
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Tellu Siattinge	1 Dokumen	2.861.000,00	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	3.147.100,00
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dannIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun	Kecamatan Tellu Siattinge	1 Dokumen	2.000.000,00	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	2.200.000,00
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Kecamatan Tellu Siattinge	1 Dokumen	2.000.000,00	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	2.200.000,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12.210.018.401,00				13.507.622.923,00
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan beserta Tambahan Penghasilan Bulanan	Kecamatan Tellu Siattinge	12 Bulan	12.210.018.401,00	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	13.507.622.923,00

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2022	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				5.000.000,00				5.500.000,00
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu		25 Stel	5.000.000,00	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		26 Stel	5.500.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				206.682.000,00				227.350.200,00
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Penunjang Administrasi Perkantoran sesuai rencana kebutuhan	Kecamatan Tellu Siattinge	1 Paket	25.026.000,00	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	27.528.600,00
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Pegawai dan Tamu sesuai rencana kebutuhan	Kecamatan Tellu Siattinge	1 Paket	150.100.000,00	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	159.830.000,00
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan sesuai rencana kebutuhan	Kecamatan Tellu Siattinge	1 Paket	9.620.000,00	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	10.582.000,00
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pembayaran Media yang menyediakan Bahan Bacaan	Kecamatan Tellu Siattinge	12 Kali	3.600.000,00	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Kali	3.960.000,00
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Rutin Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tupoksi Organisasi yang diikuti	Kecamatan Tellu Siattinge	264 Kegiatan	18.336.000,00	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		265 Kegiatan	25.449.600,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				37.431.180,00				41.174.298,00
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebeleur	Kecamatan Tellu Siattinge	3 Paket	21.000.000,00	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Paket	23.100.000,00
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Tellu Siattinge	5 Unit	16.431.180,00	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Unit	18.074.298,00

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2022	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				159.339.600,00				175.273.560,00
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik,Telpon/Wifi dan Air	Kecamatan Tellu Siattinge	36 Rekening	11.106.000,00	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		36 Rekening	12.216.600,00
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi yang mendapatkan Jasa Administrasi Keuangan selama setahun	Kecamatan Tellu Siattinge	144 Orang	148.233.600,00	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		145 Orang	163.056.960,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				95.001.220,00				104.501.342,00
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Kecamatan Tellu Siattinge	5 Unit	74.470.720,00	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Unit	81.917.792,00
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	Kecamatan Tellu Siattinge	12 Kegiatan	20.530.500,00	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Kegiatan	22.583.550,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				18.600.000,00				20.460.000,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				18.600.000,00				20.460.000,00
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Tellu Siattinge	1 Paket	18.600.000,00	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	20.460.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				505.000.000,00				555.500.000,00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				15.000.000,00				16.500.000,00

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2022	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan FKKS dan TKSK	Kecamatan Tellu Siattinge	2 Dokumen	15.000.000,00	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	16.500.000,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				490.000.000,00				539.000.000,00
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Otting, Kelurahan Tokaseng	2 Paket	448.000.000,00	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Paket	492.800.000,00
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, Pelayanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kelurahan	Kelurahan Otting, Kelurahan Tokaseng	2 Dokumen	42.000.000,00	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	46.200.000,00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				58.900.000,00				64.790.000,00
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				58.900.000,00				64.790.000,00
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Operasional Tripika	Kecamatan Tellu Siattinge	36 Kali	58.900.000,00	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		36 Kali	64.790.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				18.500.000,00				20.350.000,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				18.500.000,00				20.350.000,00
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan(ADD,TPAPD dan Penyisihan PBB)	Kecamatan Tellu Siattinge	15 Laporan	18.500.000,00	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15 Laporan	20.350.000,00

Watampone, 24 Juli 2020
CAMAT TELLU SIATTINGE

A. KUSAYYENG, S.Sos, M.Si
Pangkat : Pembina
NIP : 19661231 198602 1 020

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kecamatan Tellu Siattinge Tahun 2021 disusun berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Bone yang tertuang dalam Rencana Strategis Perencanaan Daerah Kecamatan Tellu Siattinge Tahun 2018 – 2023 yang dalam penyusunan program dan kegiatan diselaraskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang merupakan perencanaan program dan kegiatan satu tahun kedepan dibuat secara efektif dan partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi masyarakat dan stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Tellu Siattinge untuk menjamin keberhasilan program / kegiatan Renja PD (program tahunan) yang merupakan implementasi dari Renstra Perangkat Daerah (program 5 tahunan), maka perlu dilakukan upaya sebagai berikut :

1. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan Rencana Kerja secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan.
2. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja seluruh aparatur.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Siattinge selain menjadi program/kegiatan selama tahun 2021 juga berfungsi sebagai peningkatan kinerja aparatur serta barometer untuk menjadi umpan balik untuk perencanaan pada tahun berikutnya.

Rencana program di Kecamatan Tellu Siattinge tahun 2021 merupakan program pemberdayaan masyarakat serta kegiatan kerja aparatur Kecamatan Tellu Siattinge pada periode Tahun 2021. Dalam pengembangannya akan disesuaikan dengan dinamika perkembangan kebutuhan masyarakat di Kecamatan Tellu Siattinge yang pelaksanaannya bersifat efisien, tepat sasaran dan berdaya guna serta berhasil guna sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Bone yang ditetapkan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Kecamatan Tellu Siattinge selain menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan selama